

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 3 TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Islam Riau



NUR CAHYA AISYAH
167310651

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nur Cahya Aisyah
 NPM : 167310651
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
 Judul Skripsi : Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasani masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenhui ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneltian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing


 Budi Muliando, S.IP., M.Si


 Dr.Sri Maulidiah S.Sos,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nur Cahya Aisyah
 NPM : 167310651
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
 Judul Skripsi : Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Ketua,


Dr. Sri Maulidiah S.Sos, M.Si

Sekretaris,


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Anggota


Rizky Setiawan, S.Ip, M.Si

Mengetahui,
 Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

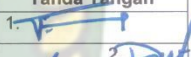

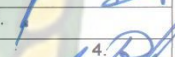

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 076/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nur Cahya Aisyah
 NPM : 167310651
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 82. " ; Huruf : " A- "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 Maret 2020
 (An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 076/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Nur Cahya Aisyah
N P M	: 167310651
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.

1. Dr. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni.,S.IP.,M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Rekanbaru
 Pada Tanggal 24 Maret 2020
 An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Cahya Aisyah
NPM : 167310651
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan peyempurnaan oleh Masiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 30 Maret 2020

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Sri Maulidiah S.Sos, M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Wakil Dekan I

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.....

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan penelitian ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam. Dan usulan penelitian ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu dengan judul :

“Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Saya ucapkan terimakasih terkhusus dan teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda Bambang Suhendra dan Ibunda Arita Maides Susanti Salam berserta mami dan nenek yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support, serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis bermohon Kepada Allah SWT semoga keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah S.Sos., M.Si selaku Pembimbing penulis sekaligus Dosen Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah ikhlas meluangkan

waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.

5. Kepada kakak saya Risya Maulidiah, dan adik saya Nurul Aini Qholby, Zaky Muammar Ramadhan serta Wiki Prasetyo yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada seluruh sahabat saya, yaitu Tasya, cindi, yessi, mega, via, cici, nani, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan Teman-teman kelas IP.H yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alamin.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca hasil penelitain saya ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 01 Maret 2020

Penulis

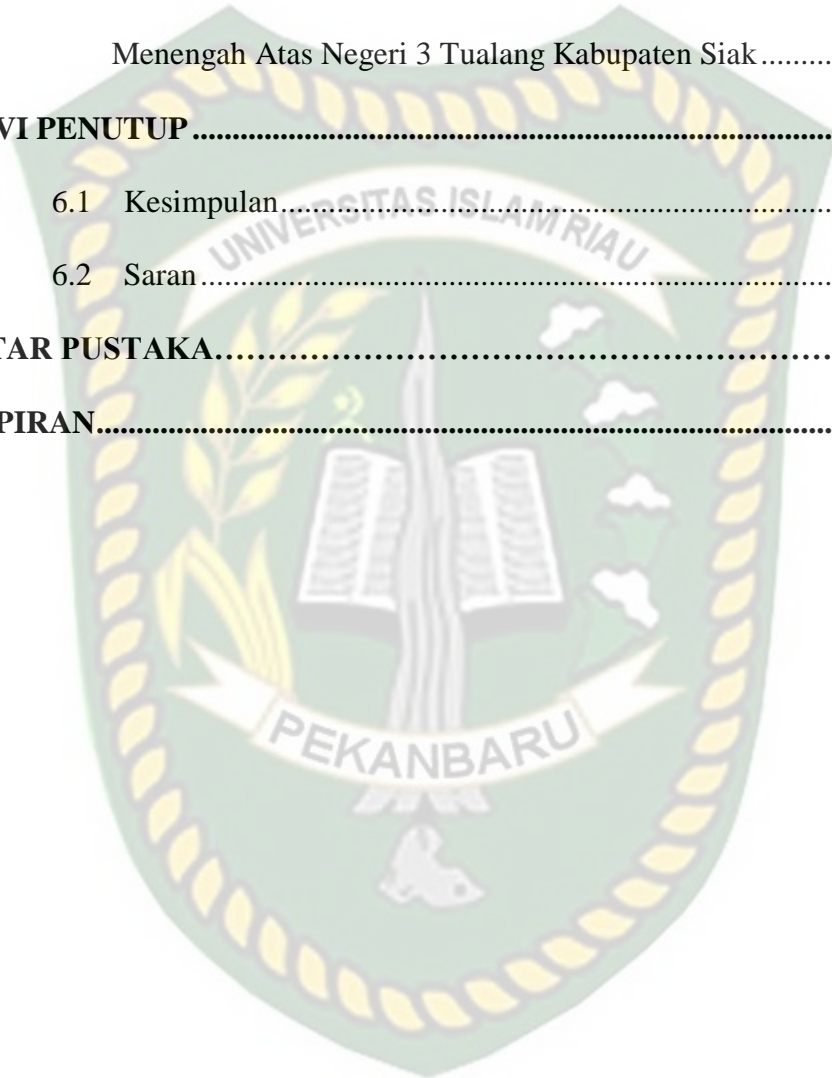
Nur Cahya Aisyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	10
2.1 Studi Kepustakaan	10
2.1.1 Konsep Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah	10
2.1.2 Konsep Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	12
2.1.3 Konsep Teori Implementasi.....	13
2.1.4 Konsep Kebijakan.....	14
2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.1.6 Konsep Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.1.7 Konsep Teori Kebijakan Pendidikan	23
2.1.8 Konsep Program Indonesia Pintar	27
2.2 Penelitian Relevan	32
2.3 Kerangka Pikiran	35
2.4 Konsep Operasional	36

2.5 Operasional Variabel.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Tipe Penelitian	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Key Informan dan Indorman.....	43
3.4 Teknik Penerukan Informan.....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	46
3.9 Rencana Sistematika Hasil Laporan Penelitian	47
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Sejarah Ringkas Sekolah.....	48
4.2 Visi Misi Sekolah.....	49
4.3 Tujuan Sekolah	50
4.4 Sumber DayaManusia	50
4.5 Kondisi Orangtua dan Siswa.....	51
4.6 Struktur Organisasi	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Identitas Responden	54
5.1.1 Usia Responden	54
5.1.2 Jenis Kelamin.....	56
5.1.3 Tingkat Pendidikan	57

5.2 Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak	59
5.3 Hambatan Dalam Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.....	89
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Sasaran dan Besaran Dana PIP.....	5
Tabel II.1 Penelitian Relevan.....	32
Tabel II.2 Konsep Operasional	39
Tabel IV.1 Sumber Daya Manusia Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang....	51
Tabel IV.2 Kondisi Orangtua Siswa	51
Tabel IV.3 Kondisi Siswa Selama Tiga Tahun.....	52
Tabel V.1 Distribusi Umur Informan.....	55
Tabel V.2 Distribusi Umur Siswa	56
Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel V.4 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Sekolah	53



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Cahya Aisyah
Npm : 167310651
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 28 Febuari 2020



Nur Cahya Aisyah

IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TUALANG KABUPATEN SIAK

NUR CAHYA AISYAH
167310651

ABSTRAK

Dalam pemerataan pendidikan pemerintah meluncurkan program pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan agar anak usia 6-21 tahun mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dan meringankan biaya personal pendidikan dengan penyaluran dana langsung kepada siswa melalui bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan untuk melihat faktor-faktor penghambat pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak. Terdapat satu key informan dan delapan informan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian bahwa Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dilihat dari 6 indikator yaitu indikator efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program masih terkendala teknis pelaksanaan seperti data tidak valid serta siswa tidak optimal dalam berpartisipasi, indikator kecukupan dan pemerataan tidak semua siswa miskin mendapatkan KIP sehingga sekolah melakukan beberapa usaha untuk melakukan upaya pemerataan seperti mengusulkan nama siswa di DAPODIK, kemudian indikator responsivitas dan ketepatan KIP dirasa sangat membantu bagi siswa kurang mampu dan diharapkan kedepannya lebih maksimal dalam upaya ketepatan penerimaan KIP. Kemudian terdapat beberapa hambatan seperti data yang tidak valid menyebabkan KIP tidak merata kemudian kurangnya sosialisasi program membuat siswa kurang paham dengan prosedur pengurusan dan siswa yang tidak mendapatkan KIP tidak melapor kepada sekolah. Saran untuk KIP agar dilakukannya pemutakhiran data, dilakukan sosialisasi kepada siswa sehingga menimbulkan sikap kooperatif dalam pemerataan KIP ini kedepannya.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Indonesia Pintar, Sekolah Menengah Atas, Pemerintahan Daerah

IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA SMART CARD IN THE HIGH SCHOOL 3 TUALANG SIAK REGENCY

NUR CAHYA AISYAH
167310651

ABSTRACT

In equal distribution, the government launched an educational program, namely the Smart Indonesia Program (PIP), which is channeled through the Smart Indonesia Card (KIP), which aims to provide children aged 6-21 to get education services to graduate education units and to reduce the personal costs of education by channeling funds directly to students through bank. The purpose of this study was to determine the implementation of KIP in 3 Tualang State High School in Siak Regency and to see the inhibiting factors for the implementation of the Smart Indonesia Card in 3 Tualang State High School in Siak Regency. There are one key informant and eight informants in this study.

From the results of the study that the Implementation of the Smart Indonesia Card in State High School 3 Tualang Siak Regency viewed from 6 indicators namely indicators of effectiveness and efficiency of program implementation is still constrained by technical implementation such as invalid data and students are not optimal in participating, indicators of adequacy and leveling are not all students poor get KIP so that schools make some efforts to make leveling efforts such as proposing names of students in DAPODIK, then indicators of responsiveness and accuracy of KIP are felt to be very helpful for underprivileged students and it is hoped that in future there will be more leverage in the efforts of KIP acceptance accuracy. Then there are some obstacles such as invalid data which causes KIP to be uneven and then the lack of program socialization makes students less familiar with the administration procedures and students who do not get KIP do not report to the school. Suggestions for KIP to update the data, do socialization to students so as to cause a cooperative attitude in the distribution of KIP in the future.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Card, High School, Local government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Negara yang maju pendidikan merupakan aspek yang terpenting. Suatu Negara bisa maju atau bahkan mundur di ukur dari grafik pendidikannya. Selain untuk memajukan Negara, pendidikan juga berguna untuk diri sendiri sehingga pendidikan tidak boleh dianggap sebelah mata atau disepelekan lagi saat ini. Belum meratanya pendidikan juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor kemiskinan di masyarakat.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan salah satu cita-cita Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejak awal masalah pendidikan sudah sangat di pikirkan agar dapat membawa Indonesia lebih maju dan dapat bersaing dengan Negara asing. Perkembangan zaman terus menuntut agar setiap orang harus memiliki kemampuan yang dapat digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan banyak orang.

Memasuki era modern seperti sekarang, Indonesia sudah harus bisa menghasilkan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang luas untuk menghadapi banyak nya revolusi-revolusi yang akan terjadi di masa depan, karena jika Indonesia tidak dapat bersaing dengan Negara asing akan mengakibatkan Negara Indonesia tidak dapat mengambil peran dalam bidang apapun. Seperti hal nya jika pendidikan Indonesia belum di maksimalkan dan belum merata maka akan banyak masyarakat yang masih belum bisa bersaing dengan Negara luar atau dengan Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke

Indonesia, karena kemampuan dari WNA tersebut pasti diatas rata-rata masyarakat yang ada dan hal itu disebabkan karena negara luar sudah mempersiapkan dari jauh hari agar pendidikan di Negara nya merata dan menghasilkan masyarakat yang dapat bersaing dengan Negara mana pun.

Kemudian Indonesia kembali di hadapkan dengan suatu revolusi yang dikenal dengan Industrie 4.0 dimana Industri ini memerlukan masyarakat yang sudah bisa menggunakan teknologi, lagi-lagi Indonesia masih tertinggal jauh dari Negara lain yang sudah sangat siap melakukan industry 4.0 tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan teknologi juga bisa menghambat pertumbuhan Indonesia, seperti dalam industry 4.0 dalam hal pertanian sudah tidak menggunakan alat manual tetapi menggunakan teknologi sedangkan masyarakat Indonesia masih menggunakan cangkul sebagai alat untuk bertani, ini akan membuat petani tidak bisa menghasilkan hasil panen sebanyak petani yang sudah menggunakan teknologi computer.

Kemajuan teknologi juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, karena jika sumber daya manusia akan tergantikan dengan mesin yang di atur menggunakan computer maka akan memangkas banyak nya pekerja seperti buruh sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang merata agar tidak ada lagi pekerja yang di PHK oleh perusahaan atau tempat kerja lainnya karena jika pendidikan masyarakat sudah tinggi mereka akan siap dengan persaingan luar bahkan Indonesia akan maju jika pendidikan di optimalkan.

Urusan pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam menyejahterakan masyarakat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah satunya berhubungan dengan pendidikan, karena masalah sosial yang timbul akibat tidak meratanya pendidikan menjadi polemik yang sangat penting untuk diselesaikan. Pendidikan yang merata dapat menekan masalah-masalah yang akan ditimbulkan dilikungan sosial, seperti menekan angka anak usia sekolah yang putus sekolah dan pendidikan yang merata juga bisa memperbaiki kesenjangan sosial yang ditimbulkan akibat pendidikan .

Asas penyelenggaraan pemerintah yang digunakan untuk mencapai sasaran pemerataan pendidikan salah satunya menggunakan asas dekonsentrasi yang dimana pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah, sehingga kebijakan pemerintah pusat tentang pendidikan di limpahkan langsung kepada pejabat di daerah agar kebijakan tersebut terimplemtasi dengan baik.

Pemerintah secara formal telah mengupayakan agar pendidikan di Indonesia merata dan efektif mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan banyaknya bantuan-bantuan untuk pendidikan yang di berikan pemerintah dan aturan wajib belajar 9 tahun yang sekarang menjadi wajib belajar 12 tahun memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya memperluas kesempatan

pendidikan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan mencoba pemerataan pendidikan agar semua lapisan masyarakat menikmati pendidikan tanpa mengenal waktu, tempat tinggal yakni kota maupun desa tetap sama.

Dalam mengupayakan pemerataan pendidikan pemerintah menyiapkan beberapa program yang digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu agar tetap bisa merasakan pendidikan. Seperti tahun 2005 pemerintah meluncurkan suatu kebijakan untuk pendidikan yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di tujukan untuk membebaskan biaya operasional pendidikan. Pemerintah juga kembali meluncurkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak tahun 2009 yang di harapkan dalam program ini juga untuk meningkatkan jumlah keikutsertaan masyarakat yang kurang mampu untuk bersekolah, putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Dan yang terbaru pemerintah meluncurkan program di bidang pendidikan pada tahun 2014 yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan menggunakan kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas/penanda penerima bantuan dana PIP, setiap siswa yang menerima bantuan PIP hanya berhak mendapatkan satu KIP yang bertujuan untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 menjelaskan program ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan

menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan disekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non formal lainnya.
4. Meringankan biaya personal pendidikan.

Kemudian dalam Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 juga menjelaskan dengan rinci sasaran dan besaran dana PIP yaitu sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Sasaran PIP
SD/Paket A	9.528.732
SMP/Paket B	4.019.090
SMA/Paket C	1.243.415
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.696.635
Jumlah	16.487.872

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017

Besaran dana di berikan kepada peserta didik yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD) / Paket A :
 - a. Peserta didik kelas I, II, III, IV, dan V Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp.450.000,00;
 - b. Peserta didik kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.225.000,00;
 - c. Peserta didik kelas I, II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp.450.000,00;
 - d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.225.000,00;

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Paket B :
 - a. Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk setahun Rp.750.000,00;
 - b. Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,00;
 - c. Peserta didik kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2017/2018 di berikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.750.000,00;
 - d. Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 di berikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,00;
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) / Paket C:
 - a. Peserta didik kelas X dan XI Tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00;
 - b. Peserta didik kelas XII Tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.500.000,00;
 - c. Peserta didik kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00;
 - d. Peserta didik kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.500.000,00.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. Program 3 Tahun
 - 1) Peserta didik SMK kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 2) Peserta didik SMK kelas XII Tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,00;
 - 3) Peserta didik SMK kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 4) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.500.000,00.
 - b. Program 4 Tahun
 - 1) Peserta didik SMK kelas X, XI, dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 2) Peserta didik SMK kelas XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.500.000,00;
 - 3) Peserta didik SMK kelas XI, XII, XIII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 4) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester Rp.500.000,00.
5. Lembaga kursus dan pelatihan :

Anak usia sekolah (16 sampai 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB / PKBM /LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar

Rp.1.000.000,00 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu priode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu Kursus.

Dalam Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 telah menjabar kan mekanisme pelaksanaan untuk peserta didik yang tidak memiliki KIP yaitu dapat diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP oleh sekolah/SKB/PKBM/LKP atau lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP dengan prioritas sebagai berikut :
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Pogram Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - 3) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti :
 - a) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu/ dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - b) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 - c) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - d) Peserta pada lembaga kursus atau satuan lembaga nonformal lainnya;
 - e) Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12 dan kelas 13;
 - f) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang : pertanian, perikanan, perternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.
- b. Sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima dana/dan manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verivikasi sekolah.
- c. Untuk jenjang SD sampai SMP, Dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan peserta didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat diakses di laman : data.dikdasmen.kemendikbud.go.id/pipdikdasmen .

- d. Peserta didik yang di usulkan oleh pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan dapat mengusulkan peserta didik calon penerima PIP ke direktorat teknis setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk keperluan validasi/verifikasi sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang di tetapkan.

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sekolah menengah atas (SMA)/ Paket C pada tahun 2018. Dalam data yang terlampir dalam Sistem Informasi Program Indonesia Pintar, Kabupaten Siak memiliki anggaran untuk tingkat SMA sebanyak Rp. 476.000.000 yang disalurkan untuk 588 siswa. Salah satu SMA di Tualang Kabupaten Siak yang telah melaksanakan PIP melalui KIP adalah SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak, menurut data yang di peroleh dari SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak ini terdapat siswa/i sebanyak 936 orang dan siswa/i yang kurang mampu sebanyak 200 orang. Tetapi dari 200 orang siswa/i yang terdata kurang mampu hanya 106 siswa yang mendapatkan KIP sehingga 94 siswa tidak mampu belum menerima KIP dan juga terdapat beberapa fenomena pelaksanaan KIP seperti :

- Belum optimalnya penyelenggaraan PIP seperti masih ditemukannya masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara mendapatkan KIP dan bagaimana cara memcairkan dana PIP.
- Masih banyak masyarakat kurang mampu belum terjaring dalam usulan PIP sehingga memunculkan protes dari orangtua siswa yang merasa layak untuk menerima dana PIP.
- Terdapat masyarakat mampu (tidak layak menerima) mendapatkan KIP dikarenakan data dari Kementrian Sosial yang tidak Valid.
- Adanya siswa pemegang KIP tetapi tidak menerima KIP.

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat **“Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak ?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam implemntasi Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak?

2.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk melihat faktor-faktor penghambat pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Sementara itu penelitian ini dharapkan berguna sebagai :

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam program Kartu Indonesia Pintar khusus ilmu pemerintahan

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang di uraikan dalam penulisan ini.

2.1.1 Konsep Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah

Menurut Syafiie (2011:8) pemerintahan ialah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu melakukan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan dikarenakan memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Jika dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan arti luas dan pemerintahan arti sempit, pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif) sedangkan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legeslatif) dan yang melaksanakan (yudikatif).

Menurut Ndraha (2000:78-79) Pemerintah itu memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer / fungsi pelayanan, dan yang kedua fungsi

sekunder / fungsi pemberdayaan. Fungsi primer itu yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih terlalu lemah dan tidak berdaya (powerless) serta termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarananya.

Kemudian dalam Peraturan PerUndang-Undangan RI Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “autonomic” yaitu auto artinya sendiri dan nomos artinya undang-undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonom yang seluas-luasnya.

Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dijalankan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum yang ada.

2.1.2 Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Syafii (2011: 74) dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang masih berlaku hingga saat ini dikenal beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi :

- 1) Asas Desentralisasi yaitu asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2) Asas Dekonsentrasi yaitu asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- 3) Tugas Pembantuan yaitu asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Di Indonesia penyelenggaraan asas dekonsentrasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan pemerintahan tersebut. Besaran dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional.

Di samping itu pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara.
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Konsep Teori Implementasi

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Kemudian Winarno (2010:149) juga memberikan padangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang bertujuan memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Subarsono (2005:87) implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang utama dari keseluruhan proses perancangan program / kebijakan. Kebijakan yang telah disarankan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi, implementasi dari suatu program melibatkan pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok saran.

2.1.4 Konsep Teori Kebijakan

Hermino (2018:125) mengatakan bahwa setiap merumuskan kebijakan harus di pastikan bahwa kebijakan itu menjangkau masa depan. Oleh sebab itu, pelaku kebijakan sering kali belum ada saat kebijakan itu di tetapkan. Sehingga dapat menyebabkan tidak tepat nya kebijakan itu sendiri karena belum jelasnya antisipasi tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya. Kebijakan dapat dimaknai dengan langkah tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau

pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah: pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negative

Sedangkan menurut William N. Dunn (2003:132), Kebijakan adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. William N Dunn (2000:610-611) mengatakan bahwa implementasi kebijakan menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk melihat hasil kebijakan yaitu sebagai berikut

1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau

layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

3. Kecukupan

William N. Dunn berpendapat bahwa kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Perataan

Perataan yang bisa diartikan dengan keadilan yang diperoleh sasaran kebijakan publik sebagai objek kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria perataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Kriteria selanjutnya adalah responsivitas yang berarti tanggapan objek kebijakan publik atas pelaksanaan suatu kebijakan serta tanggapan dari perumus kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di tengah masyarakat. William N. Dunn berpendapat bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan

Ketepatan suatu kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan

(*Appropriateness*) merupakan Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain.

2.1.5 Konsep Teori Implementasi Kebijakan

Dalam Zaini dan Hafis (2015:50) secara etimologis, implementasi dapat dimaksud dengan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil, apabila dirangkaikan terhadap kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan dengan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi adalah tahap dari suatu kebijakan public yang sangat menentukan suatu keberhasilan kebijakan. Dengan implementasi kebijakan pemerintah bisa melihat apakah suatu kebijakan telah berkalan baik atau tidak. Jika tidak adanya implemntasi maka semua tahapan kebijakan yang sudah dirumuskan akan sia-sia karena tidak dijalankan. Van Meter dan Van Horn

dalam Agustino (2016:128) merumuskan implementasi kebijakan seperti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmainan dan Sabaiter dalam Agustino (2016:128) implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengenai masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan cara yang digunakan untuk mengatur proses implementasinya.

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sehingga pada akhirnya bisa mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang di tetapkan. Kemudian keberhasilan dari implementasi kebijakan public bisa diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) sehingga dapat dilihat tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.1.6 Konsep Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yaitu suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap suatu proses implementasi kebijakan publik. Model

implementasi berisi variabel - variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari kelengkapan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini adalah beberapa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli :

a. Model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn.

Model pendekatan top – down yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:133) dikenal juga dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan suatu proses penyelenggaraan dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel , menurut van Metter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public :

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya akan menegaskan kriteria dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian kriteria dan tujuan tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari sebuah kriteria dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari kriteria dan tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia menjadi sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan

3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat berpengaruh karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi kriteria dan sasaran harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak terdapatnya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu kriteria dan sasaran kebijakan, maka suatu kebijakan akan sulit untuk bisa dicapai.

5. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari penyelenggara akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan

publik. Hal ini bisa terjadi oleh karena kebijakan yang diambil bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengerti betul persoalan dan permasalahan yang mereka alami . Tetapi kebijakan yang akan implementasikan adalah kebijakan ‘dari atas’ (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui secara detail kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Kemudian yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam sudut pandang yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:136) adalah sepanjang lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi akar masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kontributif kondisi lingkungan eksternal.

b. Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut pandangan Edwards III dalam Agustino (2016:136) ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan :

1. Komunikasi

Syarat suatu keberhasilan implementasi kebijakan adalah implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan, dan sasaran kebijakan. Jika tujuan dan sasaran tidak di ketahui dengan baik oleh pihak yang menjadi

sasaran kebijakan maka akan menimbulkan resistensi dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan variabel komunikasi :

- 1) Transmisi
- 2) Kejelasan
- 3) Konsistensi

2. Sumber Daya

walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tetapi jika tidak ada sumber daya atau kurangnya sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sumber daya manusia yaitu pelaksana implementasi (implementor). Tanpa sumber daya maka sebuah implementasi tidak akan dapat dijalankan.

Variabel sumber daya memiliki empat faktor :

- 1) Staf
- 2) Informasi
- 3) Wewenang
- 4) Fasilitas

3. Disposisi

Disposisi adalah perilaku dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau pemikiran yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan bisa menjadi tidak efektif. Variabel ini memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan :

1) Pengangkatan birokrat

2) Insentif

4. Struktur Birokrat

Birokrasi sebagai pelaksana dalam sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara matang dengan melakukan koordinasi yang baik. Sebuah struktur organisasi yang bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang mengharuskan para pegawai (pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (yaitu standar minimum yang dibutuhkan masyarakat).

c. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam Agustino (137;2016) mengutarakan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pemikiran dasarnya adalah bahwa setelah sebuah kebijakan di terapkan maka akan dilakukan implemntasi kebijakan. Implementability dari kebijakan menentukan keberhasilan

2.1.7 Konsep Teori Kebijakan Pendidikan

Dalam Hermino (2018:129) menyatakan bahwa berkenaan dengan pengertian kebijakan pendidikan, kebijakan publik bidang pendidikan dapat di definisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dengan

aktor diluar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk melakukan atau tidak melaksanakan pada bidang pendidikan yang meliputi bidang anggaran pendidikan, kurikulum, rekrument tenaga kependidikan, pengembangan professional staf, tanah, dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersangkutan langsung ataupun tidak langsung dengan pendidikan.

Muhtaj (2013) mengatakan bahwa pendidikan merupakan aset bangsa dan pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa sehingga melihat begitu pentingnya pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM). Sejalan dengan hal tersebut Khoza dalam Muhtaj (2013) menyatakan bahwa *“This interdependency between the right to education and other rights is also significant for a nation’s development”* (Ketergantungan antara hak atas pendidikan dan hak-hak lainnya juga penting bagi pembangunan bangsa).

Mark Olsen & Anne-Maie O’Neil (dalam Nugroho Riant, 2008: 36) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Marget E. Goertz (dalam Nugroho Riant, 2008: 37) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran

pendidikan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Dalam menjalankan beberapa kebijakan terdapat beberapa faktor yang mendukung dan kadang menghambat sebuah kebijakan itu berjalan dengan seharusnya, sehingga pembuat kebijakan dapat meminimalisir faktor-faktor tersebut dan memaksimalkan faktor pendukung dari sebuah implementasi kebijakan. Ada 3 faktor yang dianggap menjadi faktor keberhasilan dan penghambat menurut Arif Rohman (2012:115) yaitu :

- 1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan.

Faktor ini berhubungan dengan rumusan kebijakan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan. Jelas atau tidaknya sebuah kalimat yang dirumuskan, mudah dimengerti atau tidak, tujuannya tepat sasaran atau tidak, dan dianggap sulit dilaksanakan atau tidak. Dalam perumusan kebijakan perlu dicapainya kesepakatan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan dan informasi agar tercapainya tujuan.

- 2) Personil Pelaksanaannya

Personil berkaitan dengan pengalaman, tingkat pendidikan, kesetiaan, motivasi, komitmen, kepercayaan diri dan kinerja serta

kebiasan dan mampu berkerjasama dengan para pelaksana kebijakan lainnya.

3) Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana ini berkaitan dengan hirarki kewenangan masing-masing, jaringan sistem, gaya kepemimpinan dan pimpinan organisasi, target masing-masing yang diharapkan, serta cara evaluasi yang di pilih.

Tujuan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah untuk menetapkan sehingga arah kebijakan pada perumusan kebijakan bisa direalisasikan sebagai hasil kebijakan. Demi mencapai hasil tersebut Jan Merse (dalam M.Hasbullah 2015:96) menjelaskan beberapa faktor yang menjadi proses penghambat dari implementasi kebijakan sebagai berikut :

1) Informasi

Informasi dibutuhkan untuk menyatukan pemahaman, visi misi dari kebijakan yang dirumuskan. Untuk menghindari kesalah pahaman maka di butuhkan informasi secara terus menerus, sehingga menghindari gambaran yang kurang tepat kepada objek kebijakan atau pelaksana kebijakan.

2) Isi Kebijakan

Isi kebijakan harus tegas dan jelas dan memuat eluruh kepentingan pengguna kebijakan. Biasanya kegagalan implementasi bisa di karenakan isi kebijakan yang tidak jelas (samar) dan kurang tepat.

3) Dukungan

Dukungan dapat berbentuk fisik dan non fisik. Jika dalam sebuah kebijakan tidak mendapatkan sebuah dukungan, maka kebijakan tersebut akan susah untuk dijalankan sehingga dukungan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan.

4) Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini berhubungan dengan koordinasi masyarakat luas. Koordinasi menjadi suatu hal penting dalam titik tentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2.1.8 Konsep Program Indonesia Pintar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017, Program Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.

Program Indonesia Pintar antara lain yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah

(MA), bahkan anak – anak diluar sekolah; yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian penyelenggara program, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

PIP di tujukan untuk membantu anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap agar mendapatkan pendidikan hingga tamat jenjang sekolah menengah, baik jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Dengan program ini pemerintah berusaha mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan bisa menarik siswa putus sekolah sehingga kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga ditujukan agar bisa meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

PIP juga mempunyai prinsip dalam menjalankan program yaitu :

- 1) Efisien
Diupayakan menggunakan dana yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Efektif
Diharuskan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 3) Transparan
Menjamin adanya keterbukaan yang memudahkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
- 4) Akuntabel
Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
- 5) Kepatutan
Penjabaran program atau kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- 6) Manfaat
pelaksanaan program atau kegiatan harus sejalan dengan prioritas nasional.

Dalam pelaksanaan PIP terdapat sebuah kartu, yaitu Kartu Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut KIP. KIP digunakan untuk menandakan siswa penerima PIP dan digunakan untuk menjamin serta memastikan bahwa anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat dari PIP bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus. KIP yang dibagikan di masyarakat berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang putus sekolah di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah dan menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

PIP dilaksanakan dengan mengikutsertakan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya pengarahannya direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Penentuan penerima dana manfaat PIP dibuat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Siswa target PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
- 2) Untuk peserta didik paket A/B/C pengesahan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan SK ditetapkan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, kemendikbud.
- 3) Untuk peserta didik kursus/pelatihan penentuan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK

berdasarkan SK penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, kemdikbud.

Dalam penyaluran dana PIP, pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik/ penerima kuasa dari peserta didik di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu :

1. Rekening Tabungan.

Peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan terlebih dahulu sebelum pencairan/pengambilan dana dengan membawa :

- 1) Surat ketentuan (SK) kepala sekolah/ ketua lembaga
- 2) Identitas pengenalan (KIP/ Kartu Pelajar/ KTP/KK)

Peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP dapat di damping langsung oleh kepala sekolah/ guru/ orangtua/ wali sehingga setelah aktivasi dana PIP dapat langsung dicairkan oleh peserta didik yang menerima. Kemudian pengambilan dana PIP dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Langsung diambil oleh peserta didik dengan membawa syarat dokumen pendukung seperti KIP, kartu pelajar, KTP, KK atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah.
- 2) Dapat juga dilakukan pengambilan secara kolektif oleh kepala sekolah/kepala lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung yaitu :
 - a) Surat kuasa dari orang tua/wali atau peserta didik yang menerima PIP
 - b) Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM)
 - c) Surat keterangan dari kepala sekolah/ketua lembaga

- d) Fotokopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga dan melampirkan aslinya
- e) Fotokopi SK pengangkatan Kepala sekolah/Ketua lembaga yang masih berlaku dan menunjukan yang aslinya
- f) Dan buku tabungan peserta didik penerima PIP yang diambil secara kolektif.

2.Virtual Account

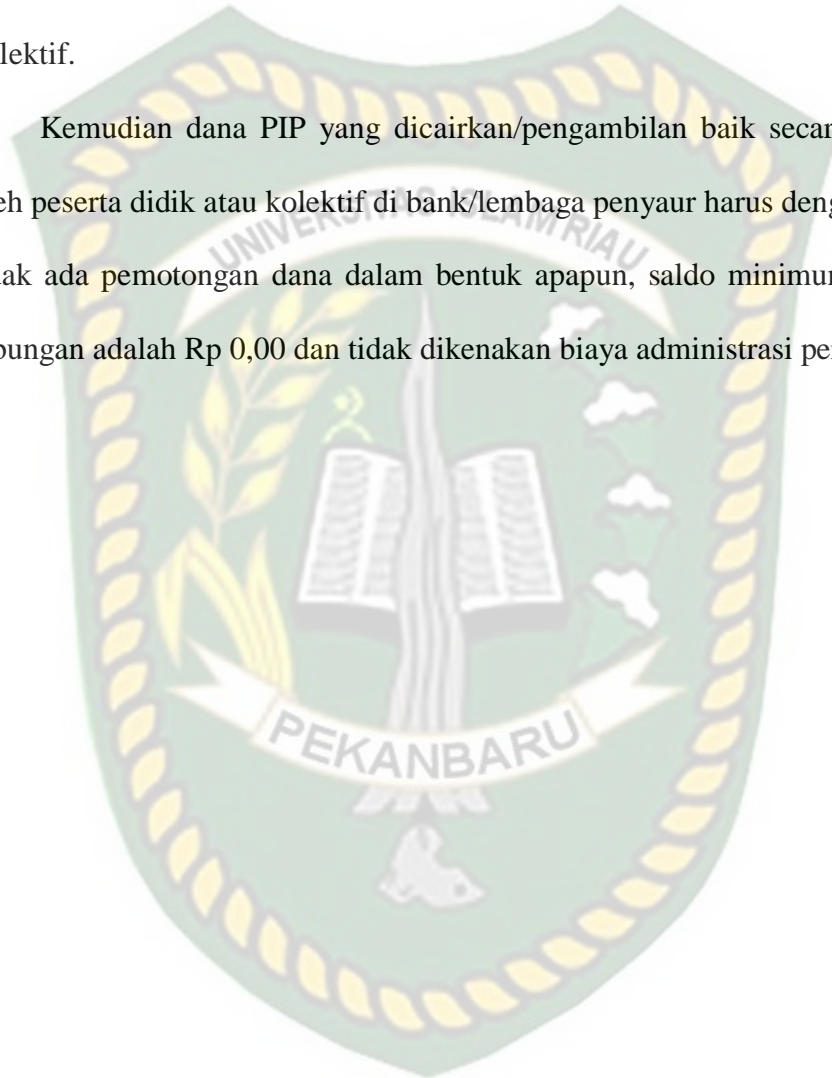
Dengan membawa surat keterangan Kepala sekolah/Ketua Lembaga dan didampingi oleh kepala sekolah/ guru/ orangtua/ wali maka bisa dilakukan pengambilan langsung oleh peserta didik. Kemudian pengambilan secara kolektif dapat dilakukan bila memnuhi salah satu syarat atau kondisi sebagai berikut :

- 1) Kondisi yang sulit untuk penerima PIP mengakses ke bank/lembaga pemyalur, seperti:
 - a) Kantor Bank/lembaga penyalur tidak ada di kecamatan sekolah/ tempat tinggal peserta didik.
 - b) Kondisi geografis menyulitkan seperti daerah pedalaman, kepulauan, dan pegunungan.
 - c) Waktu tempuh dan jarak yang relative jauh
- 2) Kondisi tempat tinggal yang di derah transportasi sulit, seperti :
 - a) Biaya transportasi yang relative besar
 - b) Terbatasnya armada transportasi
- 3) Tidak memungkinkannya penerima PIP mengambil dana secara langsung seperti :
 - a) Sedang praktik kerja lapangan (PKL)
 - b) Sedang sakit
 - c) Mengalami bencana alam/cuaca buruk
 - d) Hambatan tidak terduga lainnya.

Jika dana yang sudah di cairkan melalui kolektif maka paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan harus segera diberikan kepada siswa yang bersangkutan, dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan untuk pelaporan pemberian dana pencairan kolektif, kemudian laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD/ SMP/ SKB/ PKBM/ atau lembaga dinas pendidikan nonformal penyelenggara

Paket A dan B) atau Kepala Dinas pendidikan provinsi (untuk SMA/ SMK/ SKB/ PKBM atau lembaga nonformal penyelenggara Paket C dan pendidikan kursus, dengan menyerahkan tanda terima pendistribusian dana pengambilan kolektif.

Kemudian dana PIP yang dicairkan/pengambilan baik secara langsung oleh peserta didik atau kolektif di bank/lembaga penyalur harus dengan kondisi tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun, saldo minimum rekening tabungan adalah Rp 0,00 dan tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.



2.2 Penelitian Relevan

Tabel II.1 : Berikut ini merupakan kajian penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yona Aprilia, 2018	Implementasi Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Mneingkatkan Pendidikan Di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat bagaimana Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan pendidikan. 2. Sama-sama melihat bagaimana implementasi Kartu Indonesia Pintar berjalan di SMA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif. 2. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2	Ira Safira, 2017	Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upayah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama sama meneliti untuk melihat bagaimana PIP membantu siswa miskin. 2. Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu metode kualitaitf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep yang digunakan peneliti terdahulu adalah konsep efektifitas 2. Penelitian di lakukan untuk melihat upayah dari peningkatan kesejahteraan masyarakat

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Ahmad, 2018	Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif 2. Melihat faktor yang mendukung bagaimana KIP berjalan . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti 6 provinsi yang berbeda. 2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Milles dan Huberman.
4	Totok Suyanto, 2017	Efektivitas Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar Siswa Di Desa Ngrayun Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memiliki persamaan dalam meneliti faktor yang menjadi hambatan Kartu Indonesia Pintar 2. Metode yang digunakan adalah kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan untuk melihat dana PIP di Desa Ngrayun. 2. Penelitian ini melihat hasil implementasi Program Indonesia Pintar setelah dikomunikasikan melalui event tertentu seperti workshop.

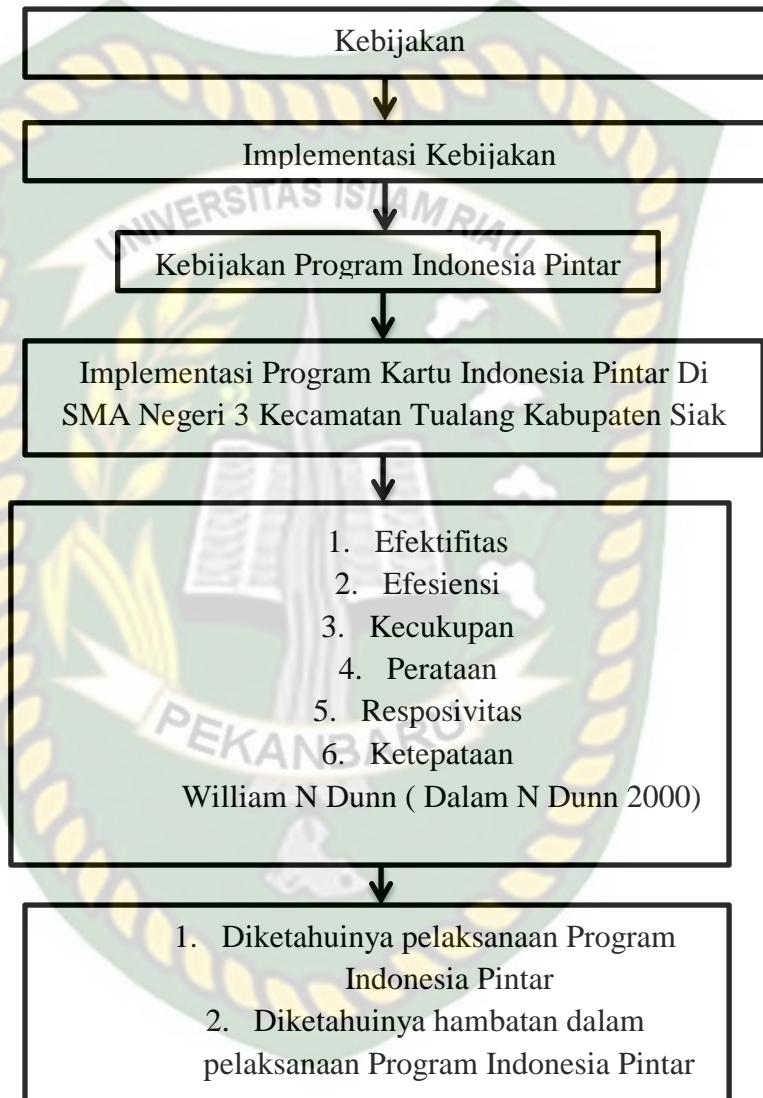
No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Saras Setyawati, 2018	Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMK Di Jeruklegi Kabupaten Cilacap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini melihat bagaimana Kartu Indonesia pintar berjalan. 2. Melihat faktor penghambat dan faktor yang mempengaruhi Kartu Indonesia Pintar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 2. Menggunakan teori efektifitas

Sumber : Olahan Penulis, 2019

2.3 Kerangka Pikiran

Gambar II.1 Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di SMA

Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak



Sumber : modifikasi penulis 2019

2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Implementasi program Kartu Indonesia Pintar Di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah adalah Pemerintahan daerah Kabupaten Siak sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tualang yang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Siak yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
3. Kebijakan merupakan kehendak yang sifatnya umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program.
4. Implementasi kebijakan implementasi merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan
5. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
6. Program Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.

7. Kartu Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut KIP. KIP digunakan untuk menandakan siswa penerima PIP dan digunakan untuk menjamin serta memastikan bahwa anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat dari PIP bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus.
8. Implementasi program PIP adalah bentuk nyata dari pelaksanaan program PIP dilapangan dengan melibatkan berbagai unsur pelaku kebijakan termasuk masyarakat.
9. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-21 tahun.
10. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
11. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
12. Kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

13. Perataan yang bisa diartikan dengan keadilan yang diperoleh sasaran kebijakan publik sebagai objek kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tersebut
14. Responsivitas yang berarti tanggapan objek kebijakan publik atas pelaksanaan suatu kebijakan serta tanggapan dari perumus kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
15. Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain.
16. SMA Negeri 3 Tualang adalah tempat atau lembaga peyalur manfaat dari KIP.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.2 Konsep Operasional

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item yang dinilai 4
Wiliiam N. Dunn (2003:132), Kebijakan adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah	Kebijakan	1. Efektifitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya tujuan Program Indonesia Pintar. b. Terlaksananya a Program kartu Indonesia Pintar
		2. Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kartu Indonesia Pintar. b. Upayah untuk pemerataan Kartu Indonesia Pintar .
		3. Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesempatan siswa Kurang Mampu Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
		4. Perataan	<p>b. Meratanya Program kartu Indonesia Pintar</p> <p>a. Pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar.</p> <p>b. Keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran Program kartu Indonesia Pintar.</p>
		5. Responsivitas	<p>a. Penilaian terhadap penyaluran dana melalui Kartu Indonesia Pintar.</p>

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item yang dinilai 4
		6. Ketepatan	b. Seberapa jauh Kartu Indonesia Pintar membantu siswa kurang mampu. a. Penilaian terhadap Program Indonesia Pintar. b. Tujuan dari Program Indonesia Pintar

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tipe naratif, adapun alasan menggunakan metode tersebut untuk mengetahui proses implementasi program Kartu Indonesia Pintar yang melihat aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dan alasan lain menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam dan bermakna. Bogdan dan Taylor (dalam Suwendra 2018:4) mengatakan bahwa merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga penelitian ini menjelaskan dengan data-data secara lisan sehingga peneliti dapat memahaminya dengan baik.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasannya karena SMA Negeri 3 Tualang merupakan salah satu sekolah yang menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan karena peneliti ingin melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi KIP

3.3 Key Informan dan Informan

3.3.1 Key Informan

Key informan dalam penelitian ini adalah operator sekolah di SMA Negeri 3 Kecamatan Tualang kabupaten Siak yang mendata dan mengelola KIP, karena peneliti menganggap bahwa operator sekolah SMA Negeri 3 memahami masalah terkait program KIP.

3.3.2 Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini informan adalah orang-orang atau pelaku yang mengetahui masalah dan informasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu :

1. Wakil Kepala Kesiswaan di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak, karena wakil kepala kesiswaan membantu operator sekolah dalam menjalankan program KIP.
2. Bendahara Sekolah di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak, karena peneliti menganggap bahwa bendahara sekolah memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan KIP.
3. Siswa penerima KIP di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak, karena peneliti ingin melihat bagaimana pandangan siswa terhadap program KIP.
4. Siswa kurang mampu yang tidak menerima KIP di SMA Negeri 3 Tualang Kabupaten siak, karena peneliti ingin melihat pandangan siswa yang tidak mendapatkan KIP.

3.3 Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah di persiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang di berikan oleh SMA Negeri 3 Tualang.

3.5 Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Interview (wawancara), yaitu memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan masalah yang ada dengan cara melakukan tanya jawab. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar objek yang dianggap dapat memberikan informasi

yang berkompeten dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai terkait fenomena yang terjadi.

2. Teknik Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulisan memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga informasi yang didapatkan penulis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, bisa berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Spradley. Menurut Spradley (dalam Moleong2014:302) analisa data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian, maka analisa data dapat dilakukan dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada empat tahapan analisa data yaitu:

- (a) analisa domein :

Analisa domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat dari buku lampiran.

- (b) analisa taksonomi

Setelah selesai analisa domein, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

(c) analisa komponen

Setelah analisa taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

(d) analisa tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pemandangan yang sedang di teliti.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juli-Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																	■	■	■	■				
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					■	■	■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								

3.8 Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab di gambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Dalam bab ini di uraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variabel

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal kegiatan penelitian

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang di lakukan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan di bahas tentang deskripsi data serta pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas Sekolah Menengah Atas 3 Tualang Kabupaten Siak

SMA Negeri 3 Tualang berdiri pada T.P 2004/2005 berdasarkan Keputusan Bupati Siak dengan Nomor : 78 TAHUN 2004, tentang Revisi Penomoran Baru dan Penegerian Beberapa Sekolah di Kabupaten Siak dengan alamat di Jalan AMD Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang sebelumnya SMA Negeri 3 Tualang bernama SMU Bunut. Setelah direvisi SMU Bunut menjadi SMA Negeri Tualang dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 30.10.91.203.003.

Adapun jumlah bangunan/ruang pada waktu itu terdiri dari 6 (enam) Ruang Belajar, 1 (satu) Ruang Kepala Sekolah, 1 (satu) Ruang Majelis Guru dan 1 (satu) Ruang Tata Usaha. Pada awal Juli 2004 di pimpin oleh Drs. H.Soritua Hasibuan sebagai Pelaksana Harian (Plh), Maret 2005 oleh Gusneti,S.Pd, September 2005 oleh Drs. H.Damsuar,M.M sebagai kepala sekolah yang tetap/definitif sampai dengan bulan Desember 2011 dan akhirnya pada bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang di pimpin oleh Indrawati,S.Pd (berdasarkan keputusan Bupati Siak dengan nomor : 03/HK/KPTS/2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak).

SMA Negeri 3 Tualang pernah berganti nama menjadi SMA Negeri 17 Siak tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009 yang disahkan oleh Bupati dengan nomor : 283/HK/KPTS/2009. Pada tanggal 02 Juli 2012 SMA Negeri 17 Siak

berganti SMA Negeri 3 Tualang berdasarkan keputusan Bupati Siak dengan nomor : 267/HK/KPTS/2012.

Lokasi SMA Negeri 3 Tualang juga berdekatan dengan SMP Negeri 7 Tualang, PT.IKPP, SD MI Nurul Ikhlas. Siswa-siswi dan masyarakat disekitar SMA Negeri 3 Tualang bersifat heterogen. Jumlah masing-masingnya hampir seimbang. Hubungan sosial budaya masing-masing suku dan agama ini kondusif, Hal ini tampak pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang diadakan di sekolah dan masyarakat.

4.2 Visi Misi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

Visi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak adalah :

" Membentuk Peserta Didik yang Berbudi Pekerti, Religi ,Berprestasi dan Berdaya Guna dalam Bingkai Budaya Melayu Tahun 2020 "

Kemudian Misi dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak ialah :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti, religi, berprestasi dan berdaya guna dalam bingkai budaya melayu tahun 2020, maka SMA Negeri 3 Tualang menetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai, agama dan budaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal baik dalam bidang akademis maupun non-akademis
3. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di sekolah dan mensinergikan seluruh potensi guna mewujudkan visi sekolah.
4. Menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali peserta didik, masyarakat, instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencapaian visi sekolah.

4.3 Tujuan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang kabupaten Siak

SMA Negeri 3 memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional sekurang-kurang mencapai 7,5.
2. Siswa yang diterima di perguruan tinggi melalui PMDK mencapai 25% dari seluruh tamatan.
3. Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi mencapai 90% dari seluruh tamatan
4. Menumbuhkan motivasi diri yang religi.
5. Menumbuhkan komitmen untuk mandiri.
6. Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah.
7. Menumbuhkan harapan prestasi tinggi.
8. Menumbuhkkan kemauan untuk berubah.
9. Mewujudkan kerjasama yang kompak, cerdas dan dinamis.
10. Melaksanakan pengioloan tenaga kependidikan secara efektif.
11. Melaksanakan pengelolaan sumber belajar secara efektif.
12. Menumbuhkan sikap responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan sekolah.
13. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
14. Meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat.
15. Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif.
16. Menerapkan sistem evaluasi yang efektif dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

4.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak terdapat Guru PNS, Guru Bantu Provinsi (GBPr), Guru Tidak Tetap Daerah (GTTD), Guru Honor (GHnr), Tata Usaha (TU), Pustakawan dan penjaga sekolah/ Tenaga kebersihan yang dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Sumber Daya Manusia Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

No	Ijazah	Jumlah	Jumlah
----	--------	--------	--------

	Tertinggi	PNS	GBPr	GTTD	GHnr	TU	Pustakawan	Penjaga Sekolah /satpam/Tenaga Kebersihan	keseluruhan
1	S 2	5			2				7
2	S1	19	2	2	19	2			44
3	D3/D2/D1					1	1		2
4	SLTA/SMK	1				1	1	5	8
5	SMP								
Jumlah		25	2	2	21	4	2	5	61

Sumber : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

4.5 Kondisi Orang Tua Siswa dan Siswa

Tabel IV.2 : Kondisi Orang Tua Siswa

Jenis Pekerjaan	PNS	Peg. Swasta	Swasta	Kary.swasta	Wiraswasta	Petani	Lain-lain
Jumlah	10	106	197	380	38	75	139

Sumber : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

Tabel IV.3 Kondisi Siswa Selama Tiga Tahun

Tahun Kelas	2016/2017			2017/2018			2018/2019		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	121	185	306	154	187	341	143	195	338
2	110	168	278	93	177	270	142	186	328
3	83	150	233	107	162	269	98	172	270
Jumlah	314	503	817	352	527	880	383	553	936
Jumlah	Rombel		27	Rombel		28	Rombel		28

Sumber : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Didalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Siswa penenerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang dan Siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang.

Untuk mengetahui identitas informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu:

5.1.1 Usia Informan

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel di bawah ini akan di gambarkan kriteria umur informan.

Pada tabel tersebut diketahui distribusi jumlah informan Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang yang telah dikelompokan berdasarkan umur yang telah dikelompokan peneliti dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi jumlah informan Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	15-25	-	-
2	26-35	-	-
3	36-45	3	100%
Jumlah		3	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang berdasarkan usia sebanyak 3 orang yang di jadikan informan atau sama dengan 100% berusia 36-45 tahun.

Selanjutnya untuk informan siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yang telah dikelompokan berdasarkan umur yang telah dikelompokan peneliti dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel V.2 : Distribusi jumlah informan siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	15-25	6	100 %
2	25-35	-	-
3	35-45	-	-
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak berdasarkan usia sebanyak 6 orang yang di jadikan informan atau sama dengan 100% berusia 15-25 tahun.

5.1.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetika yang terdiri dari dua yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita, untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	3	33,33%
2	Wanita	6	66,66%
Jumlah		9	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 3 orang berjenis kelamin pria dengan presentase 33,33% dan 6 orang bejenis kelamin perempuan dengan presentase 66,66%.

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang pernah di tempuh oleh informan, semakin tinggi jenjang pendidikan yang di tempuh maka semakin matang pola pikir seseorang dalam memngambil keputusan atau melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dapat dilihat tingkat pendidikan Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Tualang, siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada tabel berikut :

Tabel V.4 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6	66,66%
4	Strata 1 (S1)	2	22,22%
5	Magister (S2)	1	11,11%
Jumlah		9	100%

Sumber : Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Operator Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, Bendahara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang, siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dan siswa kurang mampu yang tidak menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 6 orang berpendidikan SMA dengan presentase 66,66%, kemudian 2 orang berpendidikan S1 dengan presentase 22,22% dan 1 orang berpendidikan S2 dengan presentase 11,11%.

5.2 Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3

Tualang kabupaten Siak

Kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengenai masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan cara yang digunakan untuk mengatur proses implementasinya.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini diharapkan menjadi keputusan yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya pendidikan di masyarakat kurang mampu selama ini terutama di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak, untuk mengetahui bagaimana implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dapat ditentukan oleh beberapa indikator di bawah ini :

1. Efektifitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Untuk melihat apakah Kartu Indonesia Pintar ini mencapai hasil yang diharapkan maka terdapat item-item yaitu item yang melihat tercapainya tujuan Kartu Indonesia Pintar dan item Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yang kemudian penulis mendapatkan hasil wawancara mengenai item-item ini yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Husni Budiawen S.Pd selaku Operator Sekolah mengenai tercapainya tujuan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“Kalau melihat tujuan program ini sudah bagus, karena selama ini KIP cukup membantu setidaknya untuk siswa mencukupi perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan sebagainya karena buku paket sudah disiapkan sekolah, karena salah satu tujuannya kan untuk meringankan biaya personal pendidikan.”

Sedangkan untuk pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar ini sendiri bapak Husni Budiawen S.Pd mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

“Jika pihak sekolah terutama saya sebagai operator dalam pelaksanaannya kewajiban teknis kami hanya menginput data, artinya jika anak tersebut tidak mampu dan layak menerima akan kami inputkan datanya, tapi pemuktahiran data nanti tetap kepada pemerintah, tapi kebanyakan saat ini siswa SMA banyak yang melanjutkan KIP yang didapat saat dia masih SMP walaupun bisa kita lakukan penambahan data baru”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada bapak Izhar S.Hi Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak mengenai tercapainya tujuan Kartu Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yang hasilnya sebagai berikut :

“ Tercapai atau tidak tujuan KIP jika melihat penyelenggaraan KIP beberapa tahun terakhir terutama untuk teknis siswa mendapatkan KIP tidak bisa

dipastikan karena dari 200 siswa yang menurut sekolah layak mendapatkan KIP tetapi hanya kurang lebih 100 siswa yang mendapatkan KIP”

Sedangkan untuk pelaksanaan Kartu Indonesai Pintar ini sendiri bapak Izhar S.HI mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan KIP ini penerimanya di tentukan pusat karena sekolah hanya mengusulkan saja nama-nama siswa yang dianggap sekolah layak mendapatkannya tetapi terkadang ada juga yang mampu tapi menerima KIP”.

Kemudian mengenai tercapainya tujuan Kartu Indonesia Pintar ini penulis juga mewawancari ibu Jufriyanti M.Pd sebagai Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

“Alhamdulillah program KIP ini sudah berjalan baik karena berbagai upaya telah di lakukan untuk mencapai tujuan KIP seperti penyaluran dana kepada siswa langsung kemudian siswa bisa langsung mengambilnya ke bank tanpa perantara.”

Sedangkan untuk pelaksanaan Kartu Indonesai Pintar ini ibu Jufriyanti M.Pd mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

“Pelaksanaan KIP sejauh ini sudah berjalan baik cuma terkadang terdapat beberapa kendala seperti barangkali anak tidak mampu yang tidak mendapatkan KIP.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

yang berkaitan dengan tercapainya tujuan Kartu Indonesia Pintar dan Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar hasilnya sebagai berikut :

“Tujuan dari KIP ini sendiri sepengetahuan saya untuk meningkatkan pendidikan kepada anak kurang mampu dengan menggunakan dana KIP sedangkan untuk pelaksanaannya sudah berjalan baik karena dengan KIP bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu dan untuk buat tugas (Zikra Hayati Zal siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang pada 22 Januari 2020)”.

“Tujuan KIP itu sendiri saya tidak tau karena menerima KIP dari SD tanpa adanya pemberitahuan program ini dan pelaksanaannya menurut saya sudah berjalan baik karena saya sudah merasakan dana KIP ini untuk pendidikan (Selly Sendrina Putri siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang pada 22 Januari 2020)”.

“Jika untuk tujuan apa yang ingin dicapai dari KIP saya tidak tau apa tujuannya, kemudian pelaksanaannya sudah berjalan baik jika melihat dari manfaat program ini karena manfaatnya banyak seperti beli sepatu dan beli perlengkapan sekolah lainnya sangat membantu (Putri Aulia Ningsih siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang pada 22 Januari 2020)”.

Dan penulis juga memwawancarai beberapa siswa tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang mengenai tercapainya tujuan Kartu Indonesia Pintar dan Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yaitu :

“ Saya tidak tau tentang tujuan program KIP ini dan mengenai pelaksanaannya saya juga tidak mengetahui jelasnya karena dulu saya pernah mendapatkan dana KIP saat SD dan SMP tetapi masuk ke SMA nama saya tidak keluar lagi sebagai penerima KIP (Debora Yani Simanulang siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang pada 22 Januari 2020)”.

“Saya tidak mengetahui tujuan program ini untuk apa saja yang saya ketahui program KIP ini untuk membantu siswa tidak mampu, dan jika pelaksanaannya juga saya kurang mengerti tetapi saya pernah merasakan manfaat dana KIP saat kelas 2 SMP namun saat naik kelas 2 SMA nama saya tidak keluar sebagai penerima KIP lagi (Elisa Sitorus siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang pada 22 Januari 2020)”.

“Untuk tujuannya saya tidak mengetahuinya hanya mengetahui saja bahwa ada program KIP untuk siswa kurang mampu karena saat kelas 6 SD saya mendapatkan KIP dan manfaat dana KIP itu hanya saya rasakan saat kelas 6 SD saja jika untuk pelaksanaannya sendiri saya tidak mengetahui pasti bagaimana pelaksanaan KIP (Sahmono Bancin siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai efektifitas dalam Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang adalah hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa teknis pelaksanaan yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 22 Januari 2020 09.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator efektifitas terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah atas negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dapat terlihat masih banyak yang tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan dari Kartu Indonesia Pintar dikarenakan nama siswa yang terdaftar menerima langsung dana tersebut tanpa mengetahui apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh program ini dan pelaksanaanya juga banyak tidak di pahami siswa dikarenakan siswa tidak ingin bertanya lebih jauh bagaimana sistem pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dari penjelasan yang dikemukakan mengenai efisiensi tersebut maka terdapat item yang digunakan untuk mengetahui jumlah usaha yang telah di lakukan untuk penyelenggaraan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yaitu sasaran Kartu Indonesia Pintar dan upayah untuk pemerataan Kartu Indonesia Pintar, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Husni Budiawen S.Pd selaku Operator Sekolah mengenai sasaran Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“Sasaran untuk penerima KIP ini yaitu ikut aturan yang sudah ada, jika dia tidak memiliki KIP nanti diusulkan dari lingkungan kemudian sekolah akan

menginputkan data siswa tersebut jadi secara tidak langsung ikut peraturan pemerintah yang sudah ada mengenai siswa yang layak menjadi sasaran penerima KIP.”

Sedangkan untuk pemerataan Kartu Indonesia Pintar bapak Husni Budiawen S.Pd memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Sebagai Operator Sekolah upaya yang dilakukan untuk pemerataan agar siswa tidak mampu mendapatkan KIP seperti melibatkan walikelas yang kemudian mendata siswa yang layak untuk diusulkan KIP yang terdapat dikelasnya.”

Selanjut nya penulis melakukan wawancara kepada bapak Izhar S.Hi Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak mengenai sasaran Kartu Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Sasaran penerima KIP untuk sekolah ini untuk sekarang patokan persentase untuk melihat KIP berjalan sejauh mana belum bisa digambarkan karena data diinput secara berkala.”

Sedangkan untuk pemerataan Kartu Indonesia Pintar bapak Izhar S.HI memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Jika upaya untuk pemerataan yang sekolah lakukan adalah kami memberi informasi setiap ajaran baru bahwa jika anak tersebut tergolong tidak mampu silahkan melapor kesekolah untuk nantinya kita pihak sekolah melakukan penginputan data siswa tersebut untuk kita usulkan mendapatkan KIP.”

Kemudian mengenai sasaran Kartu Indonesia Pintar ini penulis juga mewawancari ibu Jufriyanti M.Pd sebagai Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

“sasaran KIP ini adalah siswa siswa yang dikategorikan tidak mampu biasanya kita ambil dasarnya ada surat keterangan tidak mampu dari pihak RT sampai ke pihak kelurahan dan ada juga yang sampai kecamatan atau anak yatim piatu”

Sedangkan untuk pemerataan Kartu Indonesia Pintar ibu Jufriyanti M.Pd memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Jika upaya yang dilakukan untuk pemerataan antara lain pendataan kepada siswa karena memang kenyataannya disekolah kita masih banyak siswa yang belum mendapatkan KIP jadi kita adakan pendataan ulang kembali oleh pihak sekolah yang kemudian hasil pendataan kita ajukan kembali melalui operator sekolah”

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yang berkaitan dengan sasaran Kartu Indonesia Pintar dan upaya pemerataan Kartu Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

“Saya sebagai sasaran penerima KIP waktu itu mendapatkan penyuluhan tentang KIP ini sebelum masuk kesekolah ini dan menurut saya KIP sangat membantu tetapi masih tidak merata karena masih ada teman saya yang tidak mendapatkan KIP dan untuk tidak meratanya KIP ini menurut saya terkadang

faktornya orang tuanya tidak mengerti bagaimana alur mengurus KIP ini (Zikra Hayati Zal siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Menurut saya sasaran KIP belum merata saya sebagai penerima sasaran KIP tidak mendapatkan penyuluhan tentang KIP ini karena nama saya langsung keluar saat itu tanpa saya mendaftarkan nama saya, kemudian untuk pemerataan saya tidak tau usaha apa yang dilakukan tetapi menurut saya KIP menguntungkan karena saya terbantu dengan program ini (Selly Sendrina Putri siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Saya melihat masih banyak teman-teman yang belum mendapatkan KIP padahal mereka layak mendapatkan KIP jika untuk usaha pemerataan saya tidak mengetahui secara pasti tetapi selama di sekolah ini belum ada penyuluhan KIP saya mendapatkan penyuluhan tentang KIP pada saat SMP dan disitu saya mengetahui KIP, menurut saya KIP sangat membantu bagi siswa yang kurang mampu seperti kami (Putri Aulia Ningsih siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Dan penulis juga mewawancarai beberapa siswa tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang mengenai sasaran Kartu Indonesia Pintar dan upaya untuk pemerataan Kartu Indonesia Pintar pada tanggal 22 Januari 2020 yaitu :

“Saya tidak tau bagaimana cara mendapatkan KIP sehingga saya tidak pernah mengurus untuk mendapatkan kartu Indonesia pintar tetapi sepengetahuan saya KIP sasarannya untuk siswa kurang mampu untuk pemerataan saya rasa lebih jelaskan lagi bagaimana cara-cara untuk

mendapatkan KIP ini (Debora Yani Simanulang siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Saya pernah menjadi penerima sasaran KIP ini saat SMP dan untuk pemerataannya saya kurang mengerti karena tidak mendapatkan penyuluhan tentang KIP ini, dan cara mengurus untuk mendapatkan KIP juga tidak tau karena waktu SMP pernah dapat itu namanya langsung keluar tanpa melapor kepada pihak sekolah (Elisa Sitorus siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Saya salah satu sasaran penerima KIP tetapi hanya saat kelas 6 SD dan saya juga mendapatkan penyuluhan tentang KIP pada saat saya kelas 6 SD selanjutnya tidak ada lagi penyuluhan tentang KIP, dan agar KIP ini merata sepengetahuan saya hanya menyerahkan surat keterangan tidak mampu (Sahmono Bancin siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai efesiensi dalam Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang adalah sekolah sudah melakukan beberapa upaya agar siswa yang layak menerima Kartu Indonesia Pintar mendapatkannya tetapi ini tidak bisa optimal dikarenakan siswa yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar tidak secara maksimal berpartisipasi dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini dikarenakan siswa tersebut tidak mengetahui secara pasti bagaimana alur untuk mendapatkannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 22 Januari 2020 09.30 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator efesiensi terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah atas negeri 3 Tualang Kabupaten Siak dapat terlihat jika sebagian dari siswa mengetahui sasaran siswa yang layak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar namun untuk pemerataannya dirasa masih kurang maksimal dikarenakan banyak siswa yang tidak tau cara untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh siswa sehingga siswa lebih cenderung untuk menunggu namanya otomatis keluar dari pada mengurusnya dari awal.

3. Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Penulis melakukan wawancara dengan key informan dan Informan mengenai kesempatan siswa kurang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan meratanya program Kartu Indonesia Pintar yang hasilnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Husni Budiawen S.Pd selaku Operator Sekolah mengenai kesempatan siswa kurang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“Jika untuk mendapatkan KIP itu sendiri saat pendaftaran PIP sekolah akan menginputkan data siswa dengan menuliskan keterangan tidak memiliki kartu jadi semua siswa yang layak menerima itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan KIP”

Kemudian untuk melihat meratanya Kartu Indonesia Pintar bapak Husni Budiawen S.Pd memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Jika melihat merata atau tidaknya KIP bisa malalui persentase berapa siswa yang mendapatkan KIP tetapi agak susah karena kami berkerja sama dengan kesiswaan jadi operator yang mendaftarkan kemudian nama siswa yang mendapatkan KIP itu di terima oleh kesiswaan, tapi jika dikira kira dari 200an siswa setidaknya sudah ada 100an siswa yang menerima KIP.”

Selanjutnya mengenai kesempatan siswa kurang mampu mendapatkan Kart Indonesia Pintar penulis melakukan wawancara kepada bapak Izhar S.Hi Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 yang wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk kesempatan siswa menerima KIP ini sekolah setiap awal penerimaan siswa selalu memberi informasi jika siswa tersebut tidak mampu segera lapor kepada pihak sekolah untuk nantinya kita peroses lebih lanjut”

Kemudian untuk melihat meratanya program Kartu Indonesia Pintar bapak Izhar S.HI memberikan pendapat sebagai berikut :

“Melihat program ini sudah banyak membantu dan menurut saya tergantung kepada siswa nya saat ini karena menurut saya jika sudah mendapatkan KIP harusnya lebih giat dalam belajar jika sudah merata atau belum tentu saya KIP ini belum merata karena belum seluruh siswa yang layak mendapatkannya menerima KIP dan sekolah juga belum ada menarik siswa dropout kembali bersekolah”

Kemudian mengenai kesempatan siswa kurang mampu menerima Kartu Indonesia Pintar ini penulis juga memwawancari ibu Jufriyanti M.Pd sebagai Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 202 yaitu sebagai berikut :

“Untuk kesempatan mendapatkan KIP sebenarnya siswa hanya harus ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada wali kelas masing masing agar bisa mendata siswa nya yang tidak mampu kadang juga dilakukan kunjungan rumah untuk melihat kondisi keluarga kemudian data data itu yang kita kumpulkan untuk mendapatkan KIP”

Kemudian untuk melihat meratanya Kartu Indonesia Pintar ini ibu Jufriyanti M.Pd memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk melihat sejauh mana KIP merata kita harus melihat data manual dan data dapodik kalau mengukur bisa dengan persentase, dari jumlah siswa miskin dan yang harusnya berhak menerima KIP belum sampai 50% kalau disekolah ini terkadang kita tidak tau juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengeluaran SK siswa penerima KIP ini karena penerima KIP tidaklah semuanya mereka yang berasal dari kalangan yang harusnya mendapatkan KIP.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak mengenai kesempatan siswa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan meratanya Kartu Indonesia Pintar pada tanggal 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

“Saya sebagai siswa yang mendapatkan kesempatan merasakan KIP merasakan KIP membantu siswa karena saya sendiri merasakan KIP ini sangat diperukan apalagi nanti saya ingin kuliah dan menurut saya KIP sudah 75% merata dan membantu siswa tetapi masih banyak juga teman-teman yang belum mendapatkan KIP ini (Zikra Hayati Zal siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Menurut saya sebagai siswa yang berkesempatan merasakan KIP ini saya merasa Kip ini menguntungkan karena merasa terbantu, dan menurut saya KIP sudah 80% merata walaupun masih juga yang belum terjangkau untuk mendapatkan KIP (Selly Sendrina Putri siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Saya sebagai siswa yang mendapatkan KIP merasa jika KIP ini sudah sangat membantu siswa seperti kami dan untuk melihat meratanya KIP ini jika di persentasekan sudah 75% merata karena masih adanya yang belum menerima KIP ini (Putri Aulia Ningsih siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Dan penulis juga mewawancarai beberapa siswa tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang mengenai kesempatan siswa kurang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan meratanya program Kartu Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

“Saya melihat teman teman yang mendapatkan KIP sangat terbantu oleh program ini karena mereka bisa menggunakannya untuk beli tas dan lain lain tapi

untuk sasaran KIP untuk sekolah ini saya tidak puas karena yang saya lihat masih banyak yang belum menerima dan ada juga teman yang mampu mendapatkan KIP ini, karena masih ada siswa mampu yang mendapatkan KIP ini dan masih banyak siswa tidak mampu tidak mendapatkan KIP menurut saya KIP belum merata (Debora Yani Simanulang siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Menurut saya KIP sebenarnya membantu siswa untuk menunjang pendidikan namun saya tidak puas dengan tidak meratanya KIP ini karena masih banyak yang tidak mendapatkannya sehingga KIP tidak bisa dibilang sudah merata karena saya melihat bukan hanya saya tetapi banyak teman-teman lainnya juga tidak mendapatkan KIP (Elisa Sitorus siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“KIP ini sangat membantu apalagi jika program ini tepat sasaran dan untuk saat ini saya kurang puas dengan KIP karena sarannya masih ada yang tidak tepat sasaran dan masih tidak semuanya siswa kurang mampu mendapatkannya sehingga bisa dikatakan KIP tidak merata (Sahmono Bancin siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai kecukupan dalam Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang adalah masalah yang timbul dari Kartu Indonesia Pintar adalah tidak semua siswa yang dianggap layak menerima Kartu Indonesia Pintar mendapatkan kesempatan untuk

merasakan manfaat dari Kartu Indonesia Pintar tersebut sehingga menimbulkan tidak meratanya program Kartu Indonesia Pintar ini.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 22 Januari 2020 10.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator kecukupan terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah atas negeri 3 Tualang Kabupaten Siak melihat dari item indikator kesempatan siswa kurang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan meratanya Kartu Indonesia Pintar dapat terlihat jika masih banyak siswa yang harusnya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tetapi belum menerimanya jika dilihat usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk membuat siswa mendapatkan kesempatan menerima Kartu Indonesia Pintar sudah mengikuti aturan yang ada walaupun masih banyak keluhan terhadap tidak meratanya program ini dimana bisa dilihat semua merasakan jika kartu Indonesia Pintar belum merata.

4. Perataan

Perataan yang bisa diartikan dengan keadilan yang diperoleh sasaran kebijakan publik sebagai objek kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tersebut, setelah melakukan wawancara terhadap key informan dan informan penulis mendapatkan keterangan mengenai pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar dan keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program Kartu Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Husni Budiawen S.Pd selaku Operator Sekolah mengenai pemanfaatan dana Kartu

Indonesia Pintar Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“Untuk pemanfaatan dana KIP oleh siswa biasanya sekolah melakukan pengawasan lanjut terhadap dana KIP seperti koordinasi sekolah yang jelas dana tersebut untuk sekolah tetapi kami mengalami kesulitan saat mengontrol dana tersebut jika anak sudah pulang kerumah.”

Kemudian keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program kartu Indonesia Pintar bapak Husni Budiawen S.Pd memberikan keterangan sebagai berikut :

“Untuk keadilan terhadap sasaran program ini penanganan yang dilakukan untuk pemerataan ini jika dia layak sekolah harus verifikasi datanya kemudian sekolah menguruskan datanya, tetapi saat ini data banyak yang belum terintegrasi selama ini jikalau sudah kita usulkan namun nama anak tersebut belum keluar mungkin data tersebut belum masuk di pusat sana.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada bapak Izhar S.HI Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak mengenai pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yang wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam KIP ini kami melakukan pengawasan dana hanya sampai disekolah saja karena sekolah tidak ada hak dalam mengelola dana KIP tersebut setelah di cairkan oleh siswa dan kami pihak sekolah hanya mengingatkan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk kepentingan sekolah”

Jika keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program Kartu Indonesia Pintar bapak Izhar S.HI memberikan pendapat sebagai berikut :

“Untuk keadilan kepada sasaran penerima sekolah hanya menunggu siswa melaporkan jika siswa tersebut tidak mampu dan juga sekolah melakukan penjangkangan untuk siswa agar siswa yang layak mendapatkan KIP dapat mendapatkannya”

Kemudian mengenai pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar ini penulis juga memwawancari ibu Jufriyanti M.Pd sebagai Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

“Jika untuk pemanfaatan dana oleh penerima KIP kita melakukan pengawasan penggunaan dana kemudian pihak dinas pendidikan juga meminta laporan kepada sekolah tentang penerima yang telah mencairkan dana dan yang belum mencairkan dana dan harus siswa yang bersangkutan yang ke bank mencairkan dana tersebut jika mereka lalai atau tidak mengambilnya akan di berikan sanksi yaitu dana tersebut akan kembali ke kas Negara.”

Ibu Jufriyanti M.Pd juga memberikan keterangan mengenai keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran Kartu Indonesia Pintar sebagai berikut :

“Penanganan yang dilakukan untuk siswa yang tidak mendapatkan KIP ini kebetulan kami kemarin mendapatkan sosialisasi dari dinas pendidikan jika ada yang tidak mendapatkan KIP bisa melapor langsung ke dinas sosial kemudian nanti dinas sosial yang akan melakukan pengecekan apakah layak atau

tidak untuk mendapatkan KIP selain itu sekolah juga mengusahakan mendaftarkan nama anak tersebut melalui DAPODIK.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar dan keadilan lapisan masyarakat yang menjadi sasaran Kartu Indonesia Pintar pada tanggal 22 Januari 2020 hasilnya sebagai berikut :

“Dana KIP ini sudah dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu dan peralatan sekolah lainnya sedangkan untuk yang menjadi penerima KIP ini ditujukan kepada anak-anak tidak mapu yang apalagi sekarang banyak yang orangtuanya anaknya yang bersekolah tidak hanya satu dua orang kemudian (Zikra Hayati Zal siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Dana KIP digunakan untuk perlengkapan sekolah dan beli alat tulis selebihnya dana di berikan kepada orangtua dan saya tidak tau sasaran KIP itu apa jadi saya tidak mengetahui secara pasti apakah KIP sudah merata atau belum (Selly Sendrina Putri siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“KIP manfaatnya untuk membeli perlengkapan sekolah dan selebihnya saya berikan kepada orangtua untuk menilai apakah merata terhadap seluruh lapisan yang seharusnya menerima KIP ini saya tidak bisa menilainya dengan pasti karena saya kurang mengetahui siapa saja sasaran dari program ini (Putri

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai perataan dalam Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang adalah pemanfaatan dana yang sudah hampir tepat sasaran walaupun masih banyak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini namun sudah dilakukan beberapa usaha-usaha oleh sekolah yang tentu saja harus dibantu dengan kesadaran siswa dan sekolah juga sudah melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar ini.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 22 Januari 2020 10.30 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator perataan terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah atas negeri 3 Tualang Kabupaten Siak melihat dari item indikator pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar dan keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program Kartu Indonesia Pintar sejauh ini pemanfaatan dana sudah dilakukan pengontrolan oleh pihak sekolah dan menekankan jika dana tersebut harus digunakan untuk kebutuhan sekolah yang pada kenyataannya siswa menggunakan dana ini untuk membeli perlengkapan sekolah dan untuk keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program ini juga sudah di berikan pemberitahuan untuk bisa mengurus langsung kesekolah maupun melapor kepada dinas sosial tetapi siswa yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar masih banyak yang belum memiliki kemauan untuk mengurus secara langsung program ini.

5. Responsivitas

Responsivitas yang berarti tanggapan objek kebijakan publik atas pelaksanaan suatu kebijakan serta tanggapan dari perumus kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di tengah masyarakat, setelah melakukan wawancara terhadap key informan dan informan penulis mendapatkan keterangan mengenai item penilaian terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar dan seberapa jauh Kartu Indonesia Pintar membantu siswa kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Husni Budiawen S.Pd selaku Operator Sekolah mengenai penilaian terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“untuk sistem penyaluran dana menurut saya harus melibatkan sekolah sehingga jika ada dana yang dibutuhkan untuk sekolah langsung dipotong jika tidak melibatkan sekolah akan susah juga pengendaliannya.”

Kemudian seberapa jauh program ini membantu siswa kurang mampu bapak Husni Budiawen S.Pd memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Dalam penyelenggaraan KIP ini sudah sangat membantu, karena jika ada kewajiban siswa pasti terkendala dengan biaya yang kemudian jika terkendala biaya siswa tersebut akan terlambat datang sekolah atau tidak fokus belajar karena membantu orangtuanya mencari dana ”

Selanjut nya penulis melakukan wawancara kepada bapak Izhar S.Hi Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten

Siak mengenai penilaian terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar pada tanggal 22 Januari 2020 yang wawancaranya sebagai berikut :

“Jika untuk sistem penyaluran dananya menurut saya sudah bagus karena tidak melibatkan sekolah karena uang itu sensitive jadi sekarang sudah bagus langsung ke bank.”

Seberapa jauh Kartu Indonesia Pintar ini membantu siswa kurang mampu menurut tanggapan bapak Izhar S.HI adalah :

“Penilaian terhadap KIP ini bagus karena bisa dimanfaatkan untuk keperluan sekolah seperti membeli buku dan sebagainya menurut saya pemerintah sudah baik dalam membantu masalah pendidikan”

Kemudian mengenai penilaian terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar ini penulis juga memwawancari ibu Jufriyanti M.Pd sebagai Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

“Untuk penyalurannya juga sudah bagus tidak melibatkan sekolah tetapi langsung anak yang bersangkutan yang mengambil dana tersebut dengan catatan sekolah telah memberikan surat keterangan jika anak tersebut benar bersekolah di sekolah ini.”

Seberapa jauh Kartu Indonesia Pintar ini membantu siswa kurang mampu menurut tanggapan ibu Jufriyanti M.Pd ialah :

“KIP sangat membantu siswa kurang mampu mereka benar-benar merasakan manfaatnya ketika mereka mendapatkan dana tersebut mereka bisa

menggunakan untuk beli sepatu mereka dan peralatan lainnya setidaknya bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan tidak memberatkan orangtua mereka”

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yang berkaitan dengan penilaian terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar dan seberapa jauh Kartu Indonesia Pintar membantu siswa kurang mampu pada 22 Januari 2020 hasilnya sebagai berikut :

“Kebijakan KIP menurut saya sudah memuaskan dan untuk sistem penyaluran sebenarnya sudah cukup baik karena masih ada yang kurang paham dengan sistem penyaluran dana seperti ini (Zikra Hayati Zal siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Untuk penyaluran dananya tanggapan saya sudah bagus jika untuk seberapa jauh KIP membantu menurut saya kebijakan KIP ini sudah membantu kalangan bawah seperti saya (Selly Sendrina Putri siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Sistem penyalurannya menurut saya agak ribet karena harus menunggu orangtua jika orangtua lagi tidak bisa atau sedang bekerja itu yang menjadi ribet sedangkan seberapa jauh KIP membantu pendapat saya kurang puas karena masih banyak yang belum mendapatkannya (Putri Aulia Ningsih siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Dan penulis juga mewawancarai beberapa siswa tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang mengenai penilaian terhadap penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar dan seberapa jauh

Kartu Indonesia Pintar membantu siswa kurang mampu pada 22 Januari 2020s yaitu :

“Harapan saya kedepannya untuk KIP agar program ini lebih diperluas lagi hingga lebih banyak siswa tidak mampu yang terjangkau KIP dan untuk sistem penyalurannya menurut saya bagus langsung ke bank (Debora Yani Simanulang siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Harapan kedepannya untuk KIP agar lebih jeli lagi dalam mendata siswa yang tidak mampu dan KIP ini dapat membantu siswa dalam menujung pendidikan (Elisa Sitorus siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Untuk KIP kedepannya agar pemerintah lebih jeli untuk memilah mana yang layak mana yang tidak untuk mendapatkan KIP ini dan untuk sitem penyalurannya saya melihat sudah bagus dengan langsung ke bank (Sahmono Bancin siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai responsivitas dalam Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang adalah program ini dipandang sudah mampu membantu siswa kurang mampu namun adanya harapan untuk kedepannya lebih baik lagi agar semua siswa miskin bisa merasakan manfaat Kartu Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 22 Januari 2020 11.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator responsivitas terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah atas negeri 3 Tualang

Kabupaten Siak melihat dari item indikator penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar yang dimana sistem penyaluran dana melalui bank dapat di terima dengan baik oleh siswa dan pihak sekolah walupun masih ada yang merasa jika melalui bank tidak praktis tetapi sejauh ini penyaluran dana dari bank tidak memiliki kendala yang berarti dan seberapa jauh Kartu Indonesia Pintar membantu siswa kurang mampu pihak sekolah memandang bahwa Kartu Indonesia Pintar sudah membantu siswa melengkapi keperluan sekolah tanpa harus membebani orangtua mereka walaupun masih banyak keinginan dari siswa kurang mampu yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar agar kedepannya siswa tidak mampu bisa merasakan manfaat dari program ini.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain. Setelah melakukan wawancara terhadap key informan dan informan penulis mendapatkan keterangan mengenai penilaian terhadap program Kartu Indonesia Pintar dan tujuan dari Program Indonesia Pintar penulis mendapatkan informasi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Husni Budiawen S.Pd selaku Operator Sekolah mengenai penilaian terhadap Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak pada 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“Penilaian terhadap KIP ini bagus karena siswa merasa sangat terbantu ya walaupun dalam perjalanan untuk pemerataan agar siswa tidak mampu mendapatkan KIP belum optimal seperti ada siswa yang kami usulkan mendapatkan KIP sudah hampir 2 tahun tidak ada perubahan status dan ada juga siswa yang diusulkan saat SMP baru keluar namanya saat SMA tanpa diusulkan.”

Sedangkan tujuan dari Program Indonesia Pintar ini menurut bapak Husni Budiawen S.Pd adalah :

“Untuk tujuan dari program ini sendiri banyak sekali tujuan positif untuk membantu siswa kurang mampu menurut saya disekolah ini tujuan dari PIP sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin”

Selanjut nya penulis melakukan wawancara kepada bapak Izhar S.Hi Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak mengenai penilaian terhadap Kartu Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yang wawancaranya sebagai berikut :

“Penilaian untuk program ini sendiri sudah bagus karena membantu siswa dalam menunjang pendidikannya sehingga siswa sangat terbantu oleh program KIP ini.”

Tujuan Program Indonesia Pintar menurut bapak Izhar S.HI ialah :

“Tanggapan terhadap KIP ini ingin kita pihak sekolah agar KIP jangan salah diartikan oleh siswa penerima KIP tersebut karena sekolah ingin jika KIP ini siswa menjadi lebih giat belajar tanpa memikirkan dana sekolah lagi tapi masih ada juga siswa yang mendapatkan KIP tapi tidak mengoptimalkan belajarnya.”

Kemudian mengenai penilaian terhadap program Kartu Indonesia Pintar ini penulis juga mewawancarai ibu Jufriyanti M.Pd sebagai Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yaitu sebagai berikut :

“Prosesnya saat ini sudah bagus dan semoga ini akan terus berlanjut sampai nanti banyak anak-anak Indonesia yang terbantu dengan adanya program KIP ini.”

Sedangkan mengenai tujuan dari Program Indonesia Pintar ibu Jufriyanti M.Pd memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Tujuan PIP sendiri sudah bagus harapan untuk program ini semoga kedepannya pendataan terhadap siswa-siswa lebih banyak lagi yang akan menerima KIP ini ”

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yang berkaitan dengan penilaian terhadap program Kartu Indonesia Pintar dan tujuan dari Program Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yang hasilnya sebagai berikut :

“KIP cukup baik saat ini harapannya kedepan agar lebih teliti mana yang pantas mendapatkan mana yang tidak karena ada yang sudah sejahtera tapi mendapatkan KIP kasihan yang membutuhkan tetapi tidak dapat karena tujuan dari KIP itu sendiri membantu siswa kurang mampu (Zikra Hayati Zal siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Program KIP sangat membantu dan sarannya untuk kedepannya lebih dicari lagi mana yang berhak menerima dan mana yang harusnya tidak menerima

KIP dan KIP ini tujuannya sangat membantu siswa (Selly Sendrina Putri siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“Penilaian untuk KIP sudah bagus sarannya untuk KIP agar lebih dioptimalkan lagi karena KIP ini belum merata sehingga tidak semua mendapatkan KIP dan menurut saya tujuan program ini sudah bagus (Putri Aulia Ningsih siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Dan penulis juga mewawancarai beberapa siswa tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang mengenai penilaian terhadap program Kartu Indonesia Pintar dan tujuan dari Program Indonesia Pintar pada 22 Januari 2020 yaitu :

“Tanggapan untuk KIP agar lebih membantu lagi dan lebih teliti dalam mencari siswa yang tidak mampu dan menurut saya tujuan dari PIP sendiri 80% sudah bagus saya memberikan penilaian 80% dikarenakan masih ada siswa yang tidak menerima KIP jadi program ini belum berjalan dengan baik (Debora Yani Simanulang siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“KIP sebenarnya sudah membantu siswa dan saran untuk kedepan agar pemerintah lebih teliti siapa saja yang menerima KIP tersebut jadi program yang ingin dicapai melalui PIP bisa berjalan secara baik dikarenakan sasaran sudah tepat (Elisa Sitorus siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

“KIP ini sudah cukup bagus dan semoga terus berlanjut agar lebih banyak siswa yang tidak mampu mendapatkan KIP untuk secara garis besarnya tujuan

program ini cukup bagus karena membantu siswa tidak mampu (Sahmono Bancin siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang)”.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai ketepatan dalam Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang adalah program ini dipandang sudah berjalan dengan baik dan diharapkan masalah-masalah yang timbul tentang tidak meratanya Kartu Indonesia Pintar bisa diatasi agar program ini bisa maksimal membantu seluruh siswa tidak mampu dalam pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 22 Januari 2020 12.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator ketepatan terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah atas negeri 3 Tualang Kabupaten Siak melihat dari item indikator penilaian terhadap program Kartu Indonesia Pintar dimana untuk penilaian terhadap program ini mendapatkan respon yang sangat baik dari sekolah maupun dari siswa dikarenakan program ini memang membantu siswa yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah walaupun masih terdapat beberapa keinginan baik dari pihak sekolah maupun siswa untuk program ini kedepannya tetapi jika dari keseluruhan penilaian yang didapat untuk program ini mendapatkan penilaian yang baik dan tujuan dari Program Indonesia Pintar sendiri pihak sekolah mengatakan jika tujuan program ini sangat bagus yang kemudian didukung juga dengan siswa yang menerima dan yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar juga mengatakan bahwa program ini memiliki tujuan yang bagus dan tujuan dari program ini diharapkan bisa terus

berjalan sehingga semua siswa yang layak mendapatkannya bisa merasakan tujuan dari program ini kedepannya.

5.3 Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang bahwasanya hambatan yang terdapat dalam Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang tidak valid terkadang menyebabkan Kartu Indonesia Pintar tidak merata.
2. Minimnya sosialisasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar ini menyebabkan siswa yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tidak mengerti prosedur pengurusannya.
3. Terdapat siswa yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar namun tidak melapor ulang kepada pihak sekolah.
4. Dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar orangtua siswa masih banyak yang tidak paham dalam mengurus syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak menghasilkan beberapa kesimpulan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak yang di tentukan dalam 6 indikator yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Mengenai efektifitas, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa teknis pelaksanaan yang tidak berjalan dengan baik.
 - b. Mengenai efisiensi, sekolah sudah melakukan beberapa upaya agar siswa yang layak menerima Kartu Indonesia Pintar mendapatkannya tetapi ini tidak bisa optimal dikarenakan siswa yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar tidak secara maksimal berpartisipasi dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini dikarenakan siswa tersebut tidak mengetahui secara pasti bagaimana alur untuk mendapatkannya.
 - c. Mengenai kecukupan, masalah yang timbul dari Kartu Indonesia Pintar adalah tidak semua siswa yang di anggap layak menerima Kartu Indonesia Pintar mendapatkan kesempatan untuk merasakan manfaat dari Kartu

Indonesia Pintar tersebut sehingga menimbulkan tidak meratanya program Kartu Indonesia Pintar ini.

- d. Mengenai pemerataan, beberapa usaha-usaha untuk keadilan terhadap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program ini sekolah juga sudah memberikan pemberitahuan untuk bisa mengurus langsung ke sekolah tetapi siswa yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar masih banyak yang belum memiliki kemauan untuk mengurus secara langsung program ini.
 - e. Mengenai Responsivitas, tanggapan untuk program ini dipandang sudah mampu membantu siswa kurang mampu namun adanya harapan untuk kedepannya lebih baik lagi agar semua siswa miskin bisa merasakan manfaat Kartu Indonesia Pintar.
 - f. Mengenai ketepatan, program ini mendapatkan penilaian yang baik dan diharapkan masalah-masalah yang timbul tentang tidak meratanya Kartu Indonesia Pintar bisa diatasi agar program ini bisa maksimal membantu seluruh siswa tidak mampu dalam pendidikan.
2. Kendala yang terdapat dalam Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
5. Data yang tidak valid terkadang menyebabkan Kartu Indonesia Pintar tidak merata.
 6. Minimnya sosialisasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar ini menyebabkan siswa yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tidak mengerti prosedur pengurusannya.
 7. Terdapat siswa yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar namun tidak melapor ulang kepada pihak sekolah.

8. Dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar orangtua siswa masih banyak yang tidak paham dalam mengurus syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

6.2 Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk kedepannya dilakukan pemutakhiran data untuk penerima Kartu Indonesia Pintar.
2. Kepada pihak sekolah maupun pihak yang menyelenggarakan program Kartu Indonesia Pintar untuk kedepannya agar dilakukan sosialisasi secara berkala sehingga memberikan edukasi kepada siswa untuk bisa berpartisipasi dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
3. Kepada siswa yang menjadi sasaran penerima Kartu Indonesia pintar diharapkan untuk selanjutnya lebih memiliki sikap kooperatif dalam membantu pemerataan Kartu Indonesia Pintar.
4. Kepada pemerintah dan pemerintah daerah, agar lebih banyak memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana program Kartu Indonesia Pintar ini berjalan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui tahapan dari program ini serta lebih .

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Agustino,Leo.(2016). *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Aziz, A.R.(2019). *Implementasi Intruksi Presiden no 7 2014 Tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Global
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hermino, D.A (2018) *Guru Dalam Tantangan Globalisasi*. Malang: Ar-Ruzz Media
- H.M, Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Joko Widodo. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Lexy, J. Moleong , 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Martono, Nanang (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data sekunder*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Muhtaj, Majda El., 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy*. Jakarta : PT.elex Media Komputindo
- Subarsono, Andresom. (2005). *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung
- Suwendra, I Wayan (2018). *Metodologi Penelitian Kualitiatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bandung, NilaCakra
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta: Jakarta

Winarno, Budi. (2010). *Kebijakan Publik*. Caps: Yogyakarta

Zaini, Ali (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*, Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR

Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar 1945
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia
- Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
- Yona Aprilia. 2018. *Implemntasikebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dakam Usaha Meningkatkan Pendidikan Di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. (Skripsi). Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas riau.
- Ira Safira. 2017. *Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upayah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Islam*. (Skripsi). Ilmu Ekonomi . Universitas Lintang Lampung
- Ahmad. 2018. *Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)* (Skripsi). Ekonomi dan Manajemen. Universitas Sumatera Utara
- Totok Suyanto.2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar Siswa Di Desa Ngrayun Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 Tahun* (Skripsi). Kebijakan Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Saras Setyawati. 2018. *Efektifitas Program Indonesia Pintar Bagi Siswa SMK Di Jeruklegi Kabupaten Cilacap*. (Skripsi). Manajemen Pendidikan Islam. Institut Agama Islam Negeri